



FRAKSI UKHUWAH
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang



Pemandangan Umum

Fraksi Ukhawah DPRD Provinsi Sumatera Barat
Terhadap Pengantar Nota Keuangan RAPBD Tahun 2010
Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD
Provinsi Sumatera Barat tanggal 10 Desember 2009

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yth. Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Muspida dan Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan
Agama Sumatera Barat

Sdr. Kepala Dinas, Badan, dan Kantor di lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan Ormas, Orsospol, Tokoh Masyarakat, wartawan
Media Cetak dan Elektronik, serta Hadirin yang berbahagia.

Puji Syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat ridha dan karuniaNya kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini, dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Pengantar Nota Keuangan RAPBD Tahun 2010. Selanjutnya salawat beriring do'a tidak lupa pula kita kirimkan bagi junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, pembawa Rahmat untuk sekalian alam.

1. Pada Pos Pendapatan Daerah yang sah, di targetkan sebesar Rp. 39.515.000.000,- . Dari jumlah yang ditargetkan tersebut sebesar Rp. 9.200.000.000,-. Merupakan hibah dari PT. RAJAWALI sesuai dengan mekanisme sistem penganggaran, setiap pendapatan akan dikeluarkan kembali sebagai belanja. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon penjelasan apakah dana hibah dari PT. RAJAWALI juga merupakan sumber pendapatan untuk membiayai belanja daerah.
2. Pada Pos Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, bagian Laba penyertaan modal (BUMD hanya di targetkan sebesar Rp. 482.907.000,-. Melihat pada rasio dana APBD yang telah ditanamkan pada 3 Perusahaan Daerah tersebut, kontribusi yang diberikan kepada APBD sangat kecil sekali. Berkenaan dengan itu kami dari Fraksi Ukhuwah menyarankan sebaiknya Perusahaan Daerah tersebut di privatisasi saja agar tidak memberatkan keuangan daerah setiap tahunnya.
3. Untuk Pelaksanaan Pilkada, pada Pos Anggaran Belanja disediakan dana Hibah sebesar Rp. 30.000.000.000,-. Terkait dengan penyediaan dana hibah tersebut, kami menanyakan sudah ~~sejauh~~ sejauh mana langkah persiapan yang dilakukan oleh Pemda termasuk pembenahan Daftar Pemilih yang tidak akurat.
4. Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang kesehatan adalah meningkatkan akses masyarakat miskin untuk memperoleh layanan kesehatan. Namun dalam kenyataannya layanan masyarakat masih tergolong mahal sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat miskin memperhatikan permasalahan tersebut, semestinya pada APBD Provinsi alokasi dana kesehatan untuk pelayanan masyarakat miskin mendapatkan layanan yang gratis dan berkualitas. Berkenaan dengan hal tersebut mohon penjelasan Pemda sampai sejauh mana langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemda dalam Rangka Peningkatan akses layanan dan kualitas kesehatan bagi masyarakat miskin di Sumatera Barat ~~terutama~~ pada daerah-daerah Pasca Bencana.

terutama

Bapak Gubernur, Pimpinan dan Hadiri yang kami hormati,
Setelah membaca dan mempelajari Pengantar Nota Keuangan RAPBD tahun 2010, beserta seluruh lampirannya yang telah disampaikan Sdr. Gubernur pada rapat paripurna tanggal 8 Desember 2009 lalu, pada hari ini tibalah giliran fraksi-fraksi untuk menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Pengantar Nota Keuangan RAPBD tahun 2010 tersebut.

Sebagaimana kita ketahui bahwa APBD disusun sebagai implementasi dari seluruh dokumen perencanaan, dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pembangunan, dan sosial kemasyarakatan serta penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam menyusun APBD, disamping kita mengacu kepada dokumen perencanaan, juga harus didasarkan kepada hasil evaluasi situasi dan kondisi terakhir berupa masalah mendasar yang sedang dihadapi masyarakat, serta isu aktual yang berkembang, yang merupakan momentum dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan periode sebelumnya, dan kesemuanya ini harus diformulasikan secara komprehensif, terstruktur dan sistematis.

Bertolak dari kegiatan pembangunan periode sebelumnya secara tepat dan akurat akan dapat ditentukan kegiatan apa yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan dalam APBD tahun 2010 ini, sebagai upaya mempertahankan dan memberi akselerasi terhadap pembangunan yang telah dicapai.

Tujuan dan arah pembangunan suatu daerah tentunya bisa di capai jika daerah memiliki rencana pembangunan yang baik dan komprehensif. Sebagai sebuah dokumen perencanaan daerah, APBD harus memenuhi syarat rencana yang baik. Dengan demikian ada keterkaitan antara dokumen pusat, provinsi, kab/kota sampai ke tingkat nagari; ada kesinambungan dari kegiatan yang dianggarkan pada periode sebelumnya dengan anggaran kegiatan periode sesudahnya, adanya keterkaitan antara kegiatan yang dianggarkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) daerah, dan dengan tujuan, visi, misi, arah Kebijakan Umum, serta Strategi dan Prioritas; terakhir tentu dalam penyusunan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat.

Dalam Pengantar Nota Keuangan RAPBD yang telah disampaikan, dikatakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari gempa yang lalu serta prediksi tantangan yang harus dihadapi pada tahun depan tentunya membawa pengaruh terhadap keuangan daerah. Disamping itu hal yang juga perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Nota Keuangan RAPBD ini adalah fungsi yang melekat yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah, diantaranya fungsi pengaturan, fungsi pelayanan dan fungsi pemberdayaan yang tentunya harus didukung dengan

penyediaan anggaran dengan porsi yang proporsional dan seimbang.

Untuk itu kami dari Fraksi Ukhuwah ingin mempertanyakan dan menyarankan beberapa hal sbb :

1. Dalam mengevaluasi pelaksanaan APBD dari tahun ke tahun kita seharusnya tidak hanya melihat kepada capaian-capaian pertumbuhan tingkat pendapatan dan uang yang sudah dibelanjakan saja, tetapi yang paling penting dievaluasi dan direview adalah output yang dihasilkan dari belanja APBD yang dikeluarkan.
2. Agar sasaran yang ingin kita capai dalam tahun 2010 sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam rencana kita, berapa angka pertumbuhan ekonomi yang paling tepat ditetapkan untuk tahun 2010 ini? agar penduduk miskin, dan pengangguran menurun. Atau apa pilihan-pilihan yang akan kita buat dengan situasi dan kondisi saat ini ? Karena dalam menangani masalah pengentasan kemiskinan di Sumatera Barat kita perlu melihat permasalahan secara holistik.
3. Agar program yang ada dalam RAPBD tahun 2010 sesuai dengan kondisi objektif saat ini maka pemerintah perlu melakukan penyesuaian, asumsi dan pencapaian pertumbuhan ekonomi.

4. Kami memandang Pemerintah Daerah belum serius menata pendidikan di Sumatera Barat, karena terbukti alokasi anggaran belum mencapai 20% dari RAPBD, yang juga berarti belum patuh terhadap amanat UU No. 20/2003 serta Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.07/2009. Seharusnya pada tahun 2010, alokasi Dana pendidikan sudah 20%.
5. Apakah target pendapatan yang sudah ditetapkan dalam RAPBD tahun 2010 bisa dicapai sehingga tidak mengganggu belanja yang sudah dianggarkan?
6. Untuk tahun 2010 sasaran dan kebijakan apa yang akan ditetapkan, terutama dalam peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan pemberdayaan ekonomi rakyat, terutama daerah korban gempa!
7. Dalam rangka menanggulangi kemiskinan, pengangguran serta meningkatkan ekonomi kerakyatan, Fraksi Ukhuwah menyarankan agar alokasi dana yang telah ditetapkan, baik dari APBN maupun APBD betul-betul hendaknya dapat dinikmati oleh masyarakat Sumatera Barat dan tentu perlu disiasati agar tidak terjadi *capital flight* dengan memberikan peluang kepada pelaku dunia usaha kecil di Sumatera Barat yang melibatkan masyarakat/padat karya dengan tidak mengabaikan kualitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehingga dana tersebut betul-betul berputar di Sumatera Barat.

8. Kami juga memandang pengalokasian dana terhadap SKPD-SKPD belum lagi profesional, dan masih kaku menterjemahkan urusan-urusan baik yang wajib maupun pilihan. Sehingga pengalokasian dana tidak terlihat ada yang betul-betul diprioritaskan dalam mencapai target sesuai yang tertuang dalam RPJM.
9. Fraksi Ukhuwah juga mengusulkan kepada Pemerintah Daerah Sumatera Barat untuk meningkatkan dan mempercepat penyelesaian infrastruktur untuk mengantisipasi bencana Tsunami dan gempa, karena Provinsi Sumatera Barat termasuk daerah yang rawan terkena gempa dan tsunami.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin yang kami hormati,
Selanjutnya Kami dari Fraksi Ukhuwah menghimbau kepada Saudara Gubernur untuk dapat meningkatkan pengawasan terhadap disiplin, profesionalitas serta tanggungjawab semua pihak sehubungan dengan semakin hangatnya suhu politik pemilu kepala daerah, gubernur dan bupati/walikota di wilayah Sumatera Barat. Kami berharap para unit SKPD tidak terlibat dalam politik praktis apalagi ikut sebagai tim sukses calon tertentu. Kalau itu terjadi sudah dapat dibayangkan Sdr. Gubernur akan jalan sendiri, program/kegiatan yang telah

kita sepakati tidak akan dapat berjalan efektif, ujung-ujungnya silpa akan semakin tinggi dan perekonomian Sumatera Barat sulit ditingkatkan.

Demikianlah beberapa hal yang dirasa perlu untuk dipertegas dan disampaikan dalam pemandangan umum kami ini, dengan harapan atas jawaban kepala daerah nantinya akan membantu pembahasan tahap selanjutnya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kejanggalan dalam penyampaian pemandangan umum ini.

Billahi taufik wal hidayah

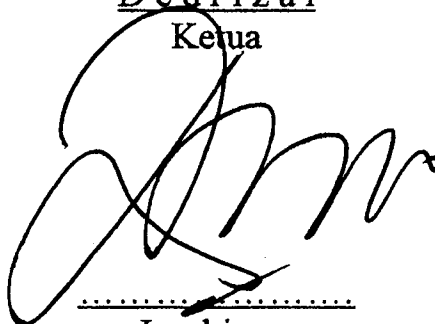
وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Padang, 10 Desember 2009

Fraksi Ukhuwah
DPRD Provinsi Sumatera Barat



Dedrizal
Ketua



.....
Jurubicara



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FRAKSI PKS)

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM
ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKAATUH,*

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RANPERDA) TENTANG APBD TAHUN 2010 PROPINSI SUMATERA BARAT

Pertama sekali marilah kita bersyukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-NYA, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna yang terhormat ini. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya serta siapa saja yang mengikutinya hingga akhir zaman.

Sebelumnya, kami Fraksi PKS menyampaikan rasa hormat kepada:

- Bapak Gubernur beserta jajaran Muspida.
- Bapak Ketua, bapak-bapak Wakil Ketua beserta seluruh Anggota Dewan..
- Bapak Kepala Pengadilan Tinggi dan Kepala Pengadilan Tinggi Agama
- Bapak Sekda Propinsi, Bapak-bapak Asisten, Kepala Dinas, Badan, Kantor di lingkungan Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat
- Pimpinan Partai Politik, Ormas, Pimpinan Perguruan Tinggi Se-Sumatera Barat.
Dan selanjutnya...
- Rekan-rekan Wartawan, baik media elektronik maupun media cetak serta hadirin yang dimuliakan...

Teriring ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada Pimpinan sidang yang telah memberi kesempatan kepada kami atas nama Fraksi PKS DPRD Propinsi Sumatera Barat menyampaikan Pemandangan Umum berkenaan Ranperda RAPBD TAHUN 2010 tersebut di atas.

Mengawali pemandangan umum Fraksi PKS terhadap Ranperda APBD 2010 kami segenap Keluarga Besar PKS Sumatera Barat menyampaikan :

- Selamat atas dilantiknya Bapak Prof. Marlis Rahman, M.Sc sebagai Gubernur Sumatera Barat oleh Mendagri Bapak Gamawan Fauzi, untuk masa kerja 2009 – 2010, semoga dapat mengemban tugas sampai akhir masa tugas dan jabatannya dengan baik
- Dalam rangka ikut memperingati hari Anti Korupsi Sedunia tanggal 9 Desember 2009, kami menyampaikan semoga dengan peringatan tersebut semua pihak dapat mengambil hikmah yang baik bagi perbaikan sistem pemerintahan kita dan dalam proses penegakan hukum di negeri ini, mari semua yang berkaitan dengan kegiatan anti korupsi kita mulai dari diri kita masing-masing, jangan hanya seremonialnya saja yang berjalan, sehingga tercipta clean governance, good government, terhindar dari berbagai pemerasan, penyalahgunaan wewenang, pungli dan manipulasi.

Bapak Gubernur, pimpinan dewan dan hadirin yang berbahagia,

Menanggapi Nota yang disampaikan oleh Saudara Gubernur pada tanggal 8 Desember 2009 lalu, pada kesempatan ini Fraksi PKS ingin menyampaikan beberapa pandangan, catatan serta pertanyaan guna memperkaya pembahasan kita pada tahap selanjutnya.

1. Ranperda APBD 2010 kali ini dibaahas pada ujung masa jabatan pasangan gubernur terpilih Gamawan Fauzi – Marlis Rahman periode 2005 – 2010, tentu ada persoalan penting terkait dengan pemenuhan janji-janji pada kampanye pemilihan gubernur saat itu. Janji-janji tersebut tertuang dalam Perda No. 4 Tahun 2007 tentang RPJMD Sumatera Barat 2005 – 2010. Berkenaan dengan hal tersebut Fraksi PKS meminta penjelasan :
 - a. Bagaimana Gubernur memformulasikan target-target RPJM tersebut dalam RAPBD 2010?
 - b. Target apa saja yang kira – kira tidak akan terealisasi pada RAPBD terakhir kali ini, dan apa permasalahannya bila tidak tercapai
 - c. Bagaimana kira – kira prediksi capaian target dalam upaya menurunkan jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka dan peningkatan investasi, mengingat target ini sering dilakukan koreksi dari target semula.

2. Ranperda APBD 2010 diawali dengan keprihatinan yang mendalam dengan terjadinya bencana atau ujian Gempa 30 September 2009 lalu yang mendatangkan kerugian masyarakat Sumbar baik material maupun immaterial. Berkenaan dengan hal tersebut mohon dijelaskan :
- a. Dana yang berhasil dihimpun oleh pemprov maupun sumbangan dari pihak luar yg masuk ke kas daerah, dan sumbangan tersebut berasal dari mana saja, apakah yang dilaporkan pada rapat tanggal 1 Desember 2009 sudah merupakan keseluruhan dana yang terhimpun
 - b. Bagaimana konsep dan pola yang dipakai gubernur dalam melakukan tahapan recoveri, rehabilitasi, maupun rekonstruksi pasca tanggap darurat? Atas dasar apa rencana tersebut dirancang akan selesai dalam kurun waktu dua tahun kedepan
 - c. Bagaimana koordinasi, sinkronisasi dengan pemerintah dan dengan pemerintah kabupaten/kota yang terkena bencana, berkaitan dengan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak
 - d. Dalam rancangan APBD 2010 ini anggaran yang dialokasikan untuk recovery ekonomi terlalu kecil, hal ini tercermin dalam anggaran dinas terkait baik dinas pertanian, perkebunan,

perikanan, peternakan maupun koperindag. Apakah rancangan anggaran ini dibuat sudah berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan berkaitan dengan kerusakan yang menimpa wilayah Sumbar, yang menjadikan masyarakat kehilangan mata pencaharian, lahan pertanian, perkebunan dan fasilitas ekonomi produktif lainnya.

3. Dari sector pendapatan daerah, mohon penjelasan
 - a. Bagaimana perkiraan potensi pendapatan daerah dari sector pajak kendaraan bermotor terutama di daerah perbatasan atau daerah yang susah dijangkau, diharapkan kondisi ini setiap tahun bisa dikurangi bukan malah sebaliknya setiap tahun akan bertambah, sehingga mengurangi pendapatan daerah.
 - b. Upaya pendekatan yg telah dilakukan pemprov kepada PT. Semen Padang untuk meningkatkan kontribusinya kepada masyarakat Sumbar dari Rp.10,- perzak menjadi Rp. 75,- perzak semen. Hal ini sangat wajar diupayakan karena keberadaan PT. SP sudah jelas di Propinsi Sumbar yang memanfaatkan potensi alam yang ada di Sumbar.
 - c. Dana perimbangan kami memahami pembagiannya sudah jelas aturannya termasuk di dalamnya diatur dalam Permenkeu. Namun bagaimana dengan dana alokasi khusus untuk tahun

2010, kenapa mengalami penurunan yang sangat tajam, apakah tidak maksimalnya upaya kita dalam melakukan pendekatan ke departemen terkait sehingga harus turun berkurang sebesar 59,26% dari tahun sebelumnya. Kita sangat prihatin dengan kondisi jalan nasional dan jalan propinsi yang ada di Sumatera barat, kalau dulu di Sumatera jalan yang paling mulus adalah Sumbar namun hari ini kondisi jalan kita paling buruk dibandingkan dengan propinsi lain di Sumatra.

4. Dana alokasi umum mengalami kenaikan hanya 1,95% dari tahun lalu, sementara belanja pegawai mengalami peningkatan sebesar 24,41%, kenapa kenaikan DAU tidak sepadan dengan kenaikan anggaran untuk belanja pegawai, dimana letak persoalannya. Apakah ada data kepegawaian yang tidak masuk pada BKD.
5. Dalam KUA/PPAS tahun ini kita menganggarkan kelanjutan pembangunan masjid raya namun sebelumnya kami mohon informasi sejauh mana kemajuan fisik dan keuangannya sampai saat ini?
6. Mengingat bahwa penganggaran pembangunan harus sinkron antara pusat, propinsi dan daerah, untuk APBD Tahun 2010 sampai sejauh ini bagaimana perkembangan pembahasan APBD di Kab/Kota? Apakah semua Kab/Kota bisa mengesahkan APBD tepat pada waktunya?

7. Mengingat bahwa tahun 2010 adalah tahun terakhir periode RPJMD 2005-2010 maka kami mohon informasi apakah masih ada target-target pembangunan fisik (seperti jalan, jembatan, irigasi, gedung dan sejenisnya) yang telah di mulai pembangunannya namun masih belum selesai/terbengkalai? Ini penting kita ketahui agar investasi yang telah tertanam pada proyek-proyek yang terbengkalai tersebut bisa dianggarkan di tahun-tahun berikutnya agar investasi tidak sia-sia.
8. Kami dapat masukan dari masyarakat bahwa beberapa kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan propinsi masih belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Kami berharap hendaknya ke depan perlu dikembangkan transparansi terhadap kegiatan-kegiatan yang bisa di akses oleh masyarakat seperti peluang-peluang permodalan, bantuan bibit dan sebagainya, sehingga masyarakat dapat mudah memperoleh program tersebut.
9. Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Pilkada serentak di Sumatera Barat. Sesuai dengan pertanyaan daerah bagaimana pola sharing dana antara propinsi dengan kota dan kabupaten. Seberapa besar terjadi penghematan anggaran. Mohon penjelasan
10. Berkaitan dengan tugas KPID Sumatera Barat pada masa yang akan datang semakin berat dan kewenangannya semakin luas. Pada tahun

2010 anggaran KPID Sumatera Barat seharusnya tidak lagi di tampung pada pos bantuan. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan anggaran KPID akan diakomodir dalam bentuk kegiatan SKPD dan sekarang sedang dirancang Ranperdanya. Mohon penjelasan?

11. Peran dan tanggung jawab MUI sebagai pembimbing dan pengayom ummat serta pemelihara aqidah ummah sudah tidak kita sangsikan lagi. Apalagi dengan adanya upaya pemurtadan yang dihadapi ummat pasca gempa. Untuk itu fraksi pks meminta agar pada APBD 2010 in MUI Sumbar sudah sepatutnya di alokasikan anggaran yang memadai.
12. Agar pelaksanaan pembangunan di tahun 2010 berjalan tepat waktu setelah RAPBD 2010 disahkan nantinya menjadi APBD 2010, disarankan gubernur sesegera mungkin mengeluarkan Peraturan Gubernur yang baru tentang Standar Biaya yang sesuai dengan perkembangan dan kondisi di lapangan.

Bapak Gubernur, pimpinan dewan dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami tanggap dari Nota Penjelasan Gubernur terhadap Rancangan perda tentang APBD TAHUN 2010 Propinsi Sumatera Barat ini yang telah disampaikan beberapa waktu

lahu. Besar harapan kami kiranya penjelasan dari Saudara Gubernur nantinya dapat membantu proses pembahasan selanjutnya dan berjalan dengan baik dan sukses, sesuai harapan serta mencapai sasaran.

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Padang, 16 Dzulhijjah 1430H
10 Desember 2009

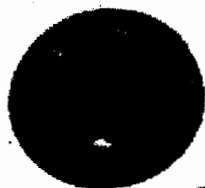
**FRAKSI PKS DPRD
PROPINSI SUMATERA BARAT**



Rafdinal, SH
Ketua

Sultani, SPt, MSi
Sekretaris

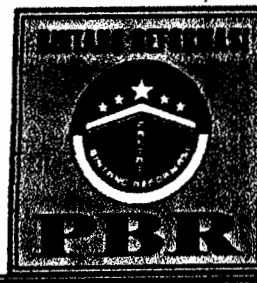
Mochklasin, SSi
Juru Bicara



FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Sekretariat : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang No. Telp. 0751-7057591-7057592-7057593

**FRI
PERJUANGAN**



PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Muspida, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat .

Yth. Sdr. Kepala-kepala Dinas/Badan dan Lembaga di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Rekan- rekan wartawan media cetak dan elektronik
serta undangan yang berbahagia.

Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah SWT,
yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya
kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam
Rapat Paripurna hari ini, dalam rangka penyampaian
Pemandangan Umum Fraksi, terhadap Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, yang disampaikan oleh Saudara Gubernur pada hari selasa tanggal 8 Desember 2009.

Shalawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita melalui ajaran Al-Qur'an dan Sunnah yang beliau tinggalkan dalam mencapai keselamatan hidup dunia dan akhirat.

Terima kasih kepada Pimpinan sidang, yang memberikan waktu kepada kami Fraksi Perjuangan Reformasi, untuk menyampaikan Pemandangan Umum ini. Terima kasih pula kepada Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang telah bekerja keras dalam pembahasan rancangan KUA dan PPAS sampai dengan menjadi bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ini. Ucapan yang sama juga kepada Badan Musyawarah yang menyusun jadwal dari awal sampai pada saat ini.

Saudara Gubernur, Pimpinan, hadirin yang berbahagia;

Dengan sampainya kita pada tahap Pemandangan Umum Fraksi hari ini, kita telah melewati beberapa proses pembahasan, dengan kerja keras memanfaatkan waktu yang tersedia, mudah-mudahan kita dapat merampungkan RAPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2010 menjadi APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010, di akhir Tahun 2009 ini, agar kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan pada awal tahun anggaran.

Dari penyampaian Saudara Gubernur, bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 disusun dengan memperhatikan kaidah sistim perencanaan dan sistim anggaran kinerja, sesuai dengan kebutuhan. Dengan berpedoman pada sasaran tahun ke-empat RPJMD Tahun 2006 - 2010, capaian sasaran RPJMD Tahun 2009, RKPD Tahun 2010, serta permasalahan mendasar dan isu aktual yang dihadapi pada Tahun 2010 (rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan fisik dan non fisik akibat bencana alam gempa bumi yang terjadi pada tanggal 30 september 2009 yang lalu dan pada Tahun 2010 adalah tahun politik dimana akan berlangsungnya pemilihan Kepala Daerah Provinsi dan 13 (tiga belas) Kepala Daerah Kabupaten/Kota.

Menanggapi hal tersebut, Fraksi Perjuangan Reformasi akan menyampaikan pendapat, pandangan, usul dan saran sebagai berikut :

1. Secara umum output dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ini kita harapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan yang partisipatif, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan sosial, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan mutu pendidikan.
2. Kita terus mendorong Pemerintah agar terus menggali sumber-sumber Pendapatan lainnya. Terutama memacu pertumbuhan ekonomi yang berdampak luas terhadap masyarakat, terutama

masyarakat miskin. Makanya sektor yang berhubungan dengan perekonomian rakyat perlu diberikan perhatian yang cukup, disamping menyiapkan sarana dan prasarana perhubungan dan transportasi untuk itu serta rehabilitasi dan rekontruksi ekonomi produktif pasca gempa bumi pada tanggal 30 September 2009 yang lalu. Maka perlu diberikannya bantuan disektor Pertanian, Peternakan, Perdagangan, Industri, Usaha kecil dan pasar tradisional.

3. Beberapa persoalan mendasar yang belum terselesaikan pada Tahun 2009, agar dapat dituntaskan pada Tahun 2010 ini, sesuai dengan RPJMD dan Visi Misi Gubernur pada Akhir Masa Jabatannya.
4. Sesuai dengan target Agenda Pembangunan Sumatera Barat Tahun 2006 - 2010 yang sudah dirumuskan dalam RPJMD, sasaran agenda seperti meningkatkan kualitas hidup beragama dan sosial budaya, meningkatnya kualitas ibadah dan meningkatnya kualitas akhlak masyarakat, meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana keagamaan dalam mensyiarkan kehidupan beragama, meningkatkan pemahaman masyarakat akan nilai budaya Minangkabau, meningkatkan rasa memiliki budaya Minangkabau bagi masyarakat Sumatera Barat.
5. Penanaman dan pemahaman nilai budaya Minangkabau dan rasa memiliki budaya Minang bagi masyarakat kita, sangat berkurang. Landasan pemahaman dan penanaman

nilai budaya sejak dini tidak lagi terlihat pada generasi muda kita. Seolah generasi muda kita merasa asing dengan budayanya sendiri.

6. Membangun SDM berkualitas, telah kita coba dengan keberpihakan terhadap anggaran pendidikan. Tinggal lagi kita memanfaatkan dan mana yang harus didahulukan antara yang wajib dengan yang mendesak (dimana banyak bangunan-bangunan sekolah yang rusak akibat gempa bumi pada tanggal 30 September yang lalu). Sementara Masih banyak masyarakat kita yang buta aksara, kualitas dan kompetensi guru harus kita tangani segera. Jumlah kelulusan siswa yang menurun dan banyak lagi persoalan pendidikan lainnya yang membutuhkan penanganan secara serius. Sebab, walaupun anggarannya cukup besar, tapi kalau tidak tepat penggunaannya, hanya akan menimbulkan permasalahan yang lainnya.
7. Mempercepat penurunan tingkat kemiskinan seiring dengan program yang jelas terhadap hal tersebut. Apa program Pemerintah terhadap hal ini, karena kami melihat, kemiskinan bukannya berkurang, malahan bertambah, apalagi seiring dengan datang musibah silih berganti, harga barang yang melonjak naik, wabah penyakit dan lain sebagainya.
8. Terakhir, Fraksi Perjuangan Reformasi berharap ke depan Pemerintah Daerah lebih selektif dalam menetapkan prioritas pembangunan, jangan sampai terlalu bernaftsu

untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai sentra/icon segala-galanya. Tapi bagaimana Pemerintah Daerah menempatkan pembangunan itu dengan skala prioritas kebutuhan publik dalam menunjang fasilitas umum untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan meratakan pembangunan dan rasa adil keseluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Sdr. Gubernur, Pimpinan serta Hadirin dan Hadirat yang kami hormati;

Demikianlah beberapa hal yang kami sampaikan dari Fraksi Perjuangan Reformasi DPRD Provinsi Sumatera Barat. Mudah mudahan Pemandangan Umum ini dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam Pembangunan yang direncanakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekilafan.

***Wabillahi Taufik Walhidayah,
Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Padang, 10 Desember 2009.

**FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**
Ketua, Sekretaris,

AGUS SUSANTO

H. ILSON CONG, SE

Juru Bicara

.....

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLKAR
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

TERHADAP

**PENGANTAR NOTA KEUANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TENTANG

APBD TAHUN 2010

10 DESEMBER 2009

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLKAR
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP
PENGANTAR NOTA KEUANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
APBD TAHUN 2010**

**Disampaikan Oleh Juru Bicara :
MUSMAIZER, SIP DT. GAMUAK**



- Yth. Sdr Gubernur Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Sdr Ketua, wakil-wakil ketua dan anggota DPRD
Prov. Sumatera Barat
- Yth. Sdr-sdr Muspida, Sdr Ketua Pengadilan Tinggi dan
Ketua Pengadilan Agama Provinsi Sumatera Barat.
- Yth. Sdr Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Kepala Dinas,
Kepala Badan dan Kantor Di lingkungan Pemda
Provinsi Sumatera Barat.
- Yth. Sdr-Sdr Pimpinan Parpol, Ormas dan Organisasi
Kepemudaan Serta Organisasi Profesi Lainnya,
Rekan-Rekan Wartawan.
Hadirin-hadirat yang kami muliakan.

Puji dan syukur marilah kita persembahkan hanya kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Shalawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan umat, suri tauladan, rahmatan lil alamin Nabi Besar Muhammad SAW yang telah meninggalkan pedoman hidup dunia dan akhirat kepada kita semua, yakni Al-Qur'an dan Sunnah.

Sebelum menyampaikan pokok-pokok pikiran terhadap Rancangan APBD Tahun 2010 ini, terlebih dahulu kami dari Fraksi Partai Golkar menyampaikan ucapan Selamat kepada Saudara Prof. DR. H. Marlis Rahman, M.Sc yang telah dilantik sebagai Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 7 Desember 2009 yang lalu. Kami berharap Saudara dapat sukses menjalankan amanah jabatan yang diberikan kepada Saudara dalam membangun negeri Sumatera Barat ini.

Mengingat beratnya tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Saudara Gubernur pada sisa masa jabatan Gubernur Sumatera Barat periode 2005-2010, kami dari Fraksi Partai Golkar mengajak kita semua untuk memberikan dukungan dan dorongan yang penuh kepada Saudara Gubernur dalam menjalankan amanah tugas yang diberikan kepadanya.

Selanjutnya pada kesempatan ini, kami dari Fraksi Partai Golkar juga menyampaikan duka dan keprihatinan yang mendalam atas musibah gempa bumi yang melanda

negeri kita pada tanggal 30 September 2009 yang lalu yang banyak merenggut korban jiwa dan benda. Untuk itu, kami dari Fraksi Partai Golkar mengajak kepada semua elemen masyarakat menyinsingkan lengan dan saling bahu membahu untuk membantu Saudara-Saudara, Sanak Keluarga kita yang tertimpa musibah gempa tersebut. Jangan kita biarkan penderitaan mereka berlarut-larut dalam waktu yang panjang. Mari kita bangun kembali negeri ini dengan semangat kebersamaan dan semangat kekeluargaan, kita bangkitkan kembali semangat hidup Saudara-Saudara kita yang tertimpa musibah, kita tumbuhkan kembali semangat dan motivasi belajar anak-anak sekolah.

Tidak lupa terima kasih kami sampaikan kepada Ketua yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang APBD Tahun 2010 yang telah disampaikan oleh Sdr. Gubernur pada tanggal 8 Desember 2009 yang lalu.

Terima kasih juga ingin saya sampaikan kepada Pimpinan Fraksi Partai Golkar yang telah memberikan kepercayaan kepada saya secara pribadi sebagai Juru Bicara pada kesempatan ini.

Sdr. Gubernur, hadirin yang berbahagia.

Sebagaimana yang kita ketahui, pada tanggal 8 Desember 2009 yang lalu, Sdr. Gubernur dalam Rapat Paripurna Dewan telah menyampaikan Nota Pengantar

Keuangan terhadap Rancangan APBD Tahun 2010. Setelah kami pelajari secara seksama, secara umum rancangan APBD yang disampaikan telah sesuai dan sejalan dengan KUA dan PPAS yang telah kita sepakati bersama.

Meskipun secara administratif dalam penyampaian Rancangan APBD Tahun 2010 terdapat kekurangan-kekurangan kelengkapan sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, namun kita dapat memakluminya bersama mengingat penyiapan Rancangan APBD Tahun 2010 disusun dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.

Menyimak dan mempelajari Nota Pengantar Gubernur tentang RAPBD Tahun 2010, ada beberapa catatan penting pada awal Pemandangan Umum ini yang ingin kami sampaikan sebagai bentuk Apresiasi Fraksi Partai Golkar terhadap penyampaian RAPBD Tahun 2010 dan perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

1. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pada akhir masa jabatannya Kepala Daerah harus memberikan pertanggungjawaban baik pertanggungjawaban politis maupun pertanggungjawaban kinerja terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangannya selama menjabat sebagai Kepala Daerah. Salah satu instrumen yang akan menjadi acuan dalam pertanggungjawaban Kepala Daerah adalah RPJMD yang merupakan perwujudan visi dan misi Kepala Daerah yang disampaikan pada waktu kampanye pemilihan Kepala Daerah.

Berhubung tahun 2010 merupakan tahun terakhir jabatan Gubernur Sumatera Barat periode 2005-2010, maka semestinya Saudara Gubernur telah mulai mengevaluasi sampai sejauh mana pencapaian terhadap target kinerja RPJMD yang telah berhasil diwujudkan. Dengan demikian, program dan kegiatan yang akan ditampung pada APBD Tahun 2010 adalah program dan kegiatan untuk memenuhi target kinerja pembangunan daerah yang belum dapat terpenuhi. Disamping itu, memperhatikan kondisi daerah pasca bencana gempa tanggal 30 September 2009 yang menghancurkan beberapa daerah di Sumatera Barat, maka semestinya target-target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan perlu dilakukan penyesuaian agar nantinya tidak memberatkan Saudara Gubernur dalam memberikan pertanggungjawaban di akhir masa jabatan. Namun sampai sekarang kami belum melihat penyesuaian target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Apabila target kinerja RPJMD tidak dilakukan penyesuaian, maka diakhirnya masa jabatan Saudara Gubernur tidak dapat memenuhi pencapaian target kinerja pembangunan daerah, untuk itu jangan dijadikan bencana gempa sebagai alasan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

2. Dana sumbangan PT. Rajawali atas penguasaan saham pada PT. Semen Padang sebesar US \$ 5.000 telah disepakati bersama untuk dijadikan dana abadi yang akan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di Sumatera Barat.

Sebagai dana abadi yang tidak akan digunakan untuk kegiatan selain mendukung kegiatan Yayasan Pendidikan yang telah didirikan, maka sebaiknya kami menyarankan dana tersebut dipisahkan dari kekayaan daerah atau dijadikan dana cadangan agar nantinya tidak meragukan pengambil kebijakan terhadap penggunaan dana sumbangan PT. Rajawali tersebut. Apabila dana sumbangan PT. Rajawali ditempatkan dalam APBD sebagai penerimaan pembiayaan, maka dapat diartikan penerimaan pembiayaan tersebut bersifat fiktif karena tidak dapat digunakan. Demikian juga dengan pemberian hibah atas bunga dana PT. Rajawali kepada Yayasan Pendidikan setiap tahun juga akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari, oleh karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemerintah Daerah yang tidak dibolehkan memberikan hibah secara terus menerus kepada suatu Yayasan.

3. Claim Asuransi PT. Askrida atas kerusakan bangunan pemerintah daerah yang diasuransi akibat bencana gempa, perlu dihitung secara lebih akurat sesuai ketentuan dengan mempedomani besaran premi asuransi yang dibayarkan untuk gedung-gedung pemerintah tersebut.
4. Pada tahun 2010, Pemerintah Daerah kembali mengalokasikan dana untuk bantuan Kredit Mikro Nagari sebesar lebih kurang Rp. 28 milyar untuk Nagari di Sumatera Barat. Sebelum Kredit Mikro tersebut disalurkan kepada masing-masing Nagari,

Fraksi Partai Golkar mengharapkan Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap Kredit Mikro Nagari yang telah disalurkan sebelumnya. Evaluasi ini sangat diperlukan untuk melihat sampai sejauh mana penyaluran bantuan Kredit Mikro Nagari, apakah betul-betul tepat sasaran serta bagaimana pertanggungjawaban kredit yang telah disalurkan tersebut termasuk bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah yang telah menyalurkan bantuan Kredit Mikro Nagari ke daerah, namun daerah Kabupaten/Kota tidak menyediakan dana pendampingnya sebagaimana yang telah disepakati bersama.

5. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, dalam penyampaian Rancangan APBD, Pemerintah Daerah harus menyampaikan pula usulan Program-program yang didanai dari APBN (dekon) kepada DPRD sebagai bahan sandingan dalam pembahasan Rancangan APBD. Berkenaan dengan hal tersebut, Fraksi Partai Golkar mengharapkan kepada Pemerintah Daerah sebelum pembahasan Rancangan APBD dilakukan oleh Badan Anggaran bersama TAPD, usulan program yang dibiayai dari APBN tersebut telah disampaikan kepada DPRD sebagai bahan dalam pembahasan APBD Tahun 2010 nantinya.
6. Dalam rancangan APBD Tahun 2010 dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada serentak di 13 Kabupaten/Kota dan Provinsi sebesar Rp. 26 Milyar. Sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi Partai

Golkar menanyakan sampai sejauh mana persiapan dan langkah-langkah pelaksanaan Pilkada yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi serta bagaimana koordinasi dan sharing dana dengan Kab/Kota. Disamping itu, Fraksi Partai Golkar juga mempertanyakan langkah-langkah pembenahan dari DPT yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Fraksi Partai Golkar memandang bahwa DPT terlebih dahulu perlu dibenahi sebelum Pilkada dilaksanakan agar pelaksanaan Pilkada tidak terjadi permasalahan terkait dengan DPT serta mendapatkan legitimasi yang kuat.

7. Pada tahun 2008 yang lalu, Pemerintah Daerah merencanakan akan melakukan kerjasama dengan sebuah lembaga untuk mengupayakan adanya dana stimulus dari negara-negara dunia untuk carbon yang dihasilkan dari hutan lindung yang ada di Sumatera Barat. Dengan adanya dana stimulus tersebut, tentunya sangat membantu sekali pada saat daerah membutuhkan untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah. Untuk itu, mohon penjelasan dari Pemerintah Daerah sudah sejauh mana langkah-langkah yang telah diupayakan untuk mendapatkan dana stimulus carbon yang dihasilkan oleh hutan lindung di Sumatera Barat.
8. Dari hasil peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, cukup banyak program-program Pemerintah Provinsi di Kabupaten/Kota yang tidak dilanjutkan pengerjaannya sehingga menjadikan proyek tersebut

sebagai proyek yang tidak berguna dan terbangkalai. Berkenaan dengan hal tersebut, Fraksi Partai Golkar mengharapkan Pemerintah Daerah dapat menginventarisir proyek-proyek yang terbangkalai tersebut serta menyediakan anggaran pada APBD Tahun 2010 untuk merampungkannya agar proyek tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

9. Program dan kegiatan yang ditampung pada APBD Tahun 2010 masih bersifat sektoral. Fraksi Partai Golkar belum melihat adanya program dan kegiatan yang saling bersinergi satu sama lainnya terutama dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Berkenaan dengan itu, Fraksi Partai Golkar mengharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan sinkronisasi antar SKPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
10. Sebagaimana yang kita ketahui, untuk pemulihan kondisi daerah pasca bencana diperkirakan akan menelan biaya sekitar Rp. 6,4 milyar. Mengingat besarnya alokasi dana yang dibutuhkan, maka kami dari Fraksi Partai Golkar memandang alokasi dana yang disediakan pada APBD Tahun 2010 sebesar Rp. 207 Milyar tersebut perlu ditingkatkan secara proporsional agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi daerah dapat lebih dipercepat.

Sdr. Gubernur, Sdr. Ketua, Hadirin yang berbahagia.

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar ini kami sampaikan, selanjutnya kami berharap Sdr. Gubernur dapat memberikan jawaban dan penjelasan atas pandangan yang telah kami sampaikan.

Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf jika ada salah dan janggal serta penggunaan bahasa yang tidak tepat, semoga seluruh niat baik kita dan seluruh sumbangsih kita untuk kemaslahatan umat ini mendapat ridha dan ganjaran yang setimpal dari Allah SWT.

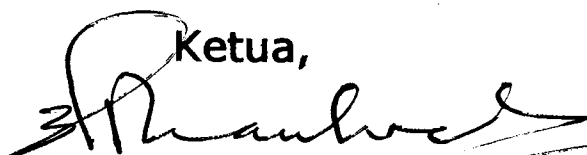
"Mari Terus Berkarya Membangun Sumatera Barat Yang Maju, Agamis, Berilmu, Berbudaya dan Sejahtera".

Wabillahittaufiq Walhidayah

وَلَسْكَ اَلْمُرْعَلِيْنَ وَرَحْمَةُ اَللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

Padang, 10 Desember 2009

**FRAKSI PARTAI GOLKAR
DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT**

Ketua,


Sekretaris,


H. YULMAN HADI, SE, SIP MUSMAIZER, SIP DT. GAMUAK

**FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010**

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD Provinsi Sumatera Barat
Kamis, 10 Desember 2009

Assalamu'allaikum Wr. Wb.

Yang Terhormat :

- Sdr. Gubernur Sumatera Barat.
- Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- Sdr. Muspida, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.
- Sdr. Sekretaris Daerah/Asisten/Kepala Badan/Dinas/Kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD, Perguruan Tinggi Se-Provinsi Sumatera Barat.
- Sdr. Pimpinan Partai politik, Ormas, OKP, Rekan-rekan wartawan Media Cetak dan Elektronik serta hadirin undangan yang kami muliakan.

Pertama-tama marilah kita menyampaikan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga berkesempatan hadir dalam sidang paripurna ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Amin....

Shalawat dan salam semoga senantiasa diberikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga,

shahabat serta kepada umatnya yang taat mengikuti sunahnya sampai akhir zaman.

Ucapan terima kasih kepada Pimpinan Sidang Paripurna yang terhormat ini yang telah memberi kami waktu untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

Hadirin, Sidang Dewan yang terhormat,

Seperti telah kita dengarkan bersama Nota Pengantar Gubernur dan mencermati Nota Keuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah disampaikan oleh Saudara Gubernur pada hari Selasa tanggal 8 Desember yang lalu, sedikit banyaknya kami Fraksi Partai Gerindra telah dapat memahami dan memberikan pandangan secara umum. Didalam Nota Keuangan tersebut tergambar keadaan, situasi dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Disamping itu dapat pula diketahui sampai sejauh mana Pemerintah Daerah telah menggunakan dan memanfaatkan sumber-sumber Pendapatan Daerah baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun yang dipungut dari masyarakat berupa pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami muliakan;

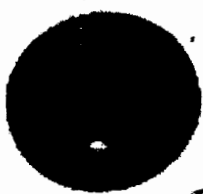
Berdasarkan uraian yang kami sampaikan diatas, maka kami Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat,

melalui kesempatan yang berbahagia ini mengajukan pertanyaan, saran dan pendapat sebagai berikut :

1. Apakah dampak signifikan yang diakibatkan oleh gempa 30 September 2009 yang lalu dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah?
2. Sejalan dengan visi RPJM yang mana menciptakan masyarakat Sumatera Barat menjadi masyarakat yang agamis dan berbudaya, tentunya pendidikan menjadi dasar dan pilar yang paling utama didalam percepatan pembangunan di Sumatera Barat tetapi Kenapa anggaran pendidikan masih jauh dari tuntutan konstitusi 20 %?

Adapun saran-saran yang kami kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Mesti ada sinkronisasi penganggaran yang disesuaikan dengan dampak gempa dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
2. Mesti ada planning anggaran yang lebih cermat sejalan dengan prioritas pembangunan tentang pendidikan pariwisata, pertanian dan pemberdayaan masyarakat miskin.
3. Dalam menyikapi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa, maka diharapkan kepada pihak perbankan khususnya Bank Nagari untuk memberikan kontribusi yang lebih besar serta mendukung pembangunan perekonomian yang tentunya didukung dengan kekuatan financial dan dukungan kita bersama.
4. Sudah seharusnya mulai dipikirkan perencanaan anggaran yang tidak terpaku pada plafon, tapi lebih menekankan pada rasionalisasi yang disesuaikan dengan skala prioritas yang terencana dan terukur.



**FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

Sekretariat : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang No. Telp. 0751-7057591-7057592-7057593

**FBI
PERJUANGAN**



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

**Yth. Sdr. Muspida, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat .**

**Yth. Sdr. Kepala-kepala Dinas/Badan dan Lembaga di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.**

**Yth. Sdr. Rekan- rekan wartawan media cetak dan elektronik
serta undangan yang berbahagia.**

**Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah SWT,
yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya
kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam
Rapat Paripurna hari ini, dalam rangka penyampaian
Pemandangan Umum Fraksi, terhadap Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan**

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, yang disampaikan oleh Saudara Gubernur pada hari selasa tanggal 8 Desember 2009.

Shalawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita melalui ajaran Al-Qur'an dan Sunnah yang beliau tinggalkan dalam mencapai keselamatan hidup dunia dan akhirat.

Terima kasih kepada Pimpinan sidang, yang memberikan waktu kepada kami Fraksi Perjuangan Reformasi, untuk menyampaikan Pemandangan Umum ini. Terima kasih pula kepada Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang telah bekerja keras dalam pembahasan rancangan KUA dan PPAS sampai dengan menjadi bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ini. Ucapan yang sama juga kepada Badan Musyawarah yang menyusun jadwal dari awal sampai pada saat ini.

Saudara Gubernur, Pimpinan, hadirin yang berbahagia;

Dengan sampainya kita pada tahap Pemandangan Umum Fraksi hari ini, kita telah melewati beberapa proses pembahasan, dengan kerja keras memanfaatkan waktu yang tersedia, mudah-mudahan kita dapat merampungkan RAPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2010 menjadi APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010, di akhir Tahun 2009 ini, agar kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan pada awal tahun anggaran.

Dari penyampaian Saudara Gubernur, bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 disusun dengan memperhatikan kaidah sistim perencanaan dan sistim anggaran kinerja, sesuai dengan kebutuhan. Dengan berpedoman pada sasaran tahun ke-empat RPJMD Tahun 2006 - 2010, capaian sasaran RPJMD Tahun 2009, RKPD Tahun 2010, serta permasalahan mendasar dan isu aktual yang dihadapi pada Tahun 2010 (rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan fisik dan non fisik akibat bencana alam gempa bumi yang terjadi pada tanggal 30 september 2009 yang lalu dan pada Tahun 2010 adalah tahun politik dimana akan berlangsungnya pemilihan Kepala Daerah Provinsi dan 13 (tiga belas) Kepala Daerah Kabupaten/Kota.

Menanggapi hal tersebut, Fraksi Perjuangan Reformasi akan menyampaikan pendapat, pandangan, usul dan saran sebagai berikut :

1. Secara umum output dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ini kita harapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan yang partisipatif, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan sosial, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan mutu pendidikan.
2. Kita terus mendorong Pemerintah agar terus menggali sumber-sumber Pendapatan lainnya. Terutama memacu pertumbuhan ekonomi yang berdampak luas terhadap masyarakat, terutama

masyarakat miskin. Makanya sektor yang berhubungan dengan perekonomian rakyat perlu diberikan perhatian yang cukup, disamping menyiapkan sarana dan prasarana perhubungan dan transportasi untuk itu serta rehabilitasi dan rekonstruksi ekonomi produktif pasca gempa bumi pada tanggal 30 September 2009 yang lalu. Maka perlu diberikannya bantuan disektor Pertanian, Peternakan, Perdagangan, Industri, Usaha kecil dan pasar tradisional.

3. Beberapa persoalan mendasar yang belum terselesaikan pada Tahun 2009, agar dapat dituntaskan pada Tahun 2010 ini, sesuai dengan RPJMD dan Visi Misi Gubernur pada Akhir Masa Jabatannya.
4. Sesuai dengan target Agenda Pembangunan Sumatera Barat Tahun 2006 - 2010 yang sudah dirumuskan dalam RPJMD, sasaran agenda seperti meningkatkan kualitas hidup beragama dan sosial budaya, meningkatnya kualitas ibadah dan meningkatnya kualitas akhlak masyarakat, meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana keagamaan dalam mensyiarkan kehidupan beragama, meningkatkan pemahaman masyarakat akan nilai budaya Minangkabau, meningkatkan rasa memiliki budaya Minangkabau bagi masyarakat Sumatera Barat.
5. Penanaman dan pemahaman nilai budaya Minangkabau dan rasa memiliki budaya Minang bagi masyarakat kita, sangat berkurang. Landasan pemahaman dan penanaman

nilai budaya sejak dini tidak lagi terlihat pada generasi muda kita. Seolah generasi muda kita merasa asing dengan budayanya sendiri.

6. Membangun SDM berkualitas, telah kita coba dengan keberpihakan terhadap anggaran pendidikan. Tinggal lagi kita memanfaatkan dan mana yang harus didahulukan antara yang wajib dengan yang mendesak (dimana banyak bangunan-bangunan sekolah yang rusak akibat gempa bumi pada tanggal 30 September yang lalu). Sementara Masih banyak masyarakat kita yang buta aksara, kualitas dan kompetensi guru harus kita tangani segera. Jumlah kelulusan siswa yang menurun dan banyak lagi persoalan pendidikan lainnya yang membutuhkan penanganan secara serius. Sebab, walaupun anggarannya cukup besar, tapi kalau tidak tepat penggunaannya, hanya akan menimbulkan permasalahan yang lainnya.
7. Mempercepat penurunan tingkat kemiskinan seiring dengan program yang jelas terhadap hal tersebut. Apa program Pemerintah terhadap hal ini, karena kami melihat, kemiskinan bukannya berkurang, malahan bertambah, apalagi seiring dengan datang musibah silih berganti, harga barang yang melonjak naik, wabah penyakit dan lain sebagainya.
8. Terakhir, Fraksi Perjuangan Reformasi berharap ke depan Pemerintah Daerah lebih selektif dalam menetapkan prioritas pembangunan, jangan sampai terlalu bernaflu

untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai sentra/icon segala-galanya. Tapi bagaimana Pemerintah Daerah menempatkan pembangunan itu dengan skala prioritas kebutuhan publik dalam menunjang fasilitas umum untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan meratakan pembangunan dan rasa adil keseluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Sdr. Gubernur, Pimpinan serta Hadirin dan Hadirat yang kami hormati;

Demikianlah beberapa hal yang kami sampaikan dari Fraksi Perjuangan Reformasi DPRD Provinsi Sumatera Barat. Mudah mudahan Pemandangan Umum ini dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam Pembangunan yang direncanakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekilafan.

***Wabillahi Taufik Walhidayah,
Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Padang, 10 Desember 2009.

**FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua,

Sekretaris,


AGUS SUSANTO


H. ILSON CONG, SE

Juru Bicara

.....



PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT TERHADAP
PENGANTAR NOTA KEUANGAN RAPBD TAHUN 2010
=====

Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua !

Alhamdulillah

- Yth : Sdr. Gubernur Prov. SUMBAR
- Yth : Sdr. Ketua dan para Wakil Ketua dan anggota DPRD Prov. SUMBAR
- Yth : Sdr Ketua Pengadilan Tinggi, dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Prov. SUMBAR
- Yth : Musyawarah Pimpinan Daerah Prov. SUMBAR
- Yth : Sdr. Kepala SKPD di lingkungan PEMPROV SUMBAR
- Yth : Sdr. Pimpinan Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat dan rekan-rekan wartawan media cetak dan maupun media elektronik, serta hadirin dan undangan yang berbahagia.

Pertama dan utama sekali kita panjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Karunia dan Hidayahnya pada kita semua, sehingga kita dapat melangkah^{kan} kaki dan hadir dalam ruangan ini untuk menghadiri sidang paripurna ini.

Selanjutnya marilah sama-sama kita kirimkan shalawat dan salam kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan *"Allah Humma Shalli Ala Saiyidina Muhammad, Wa ala Ali Muhammad"* yang telah meninggalkan Al-Quran dan Hadist sebagai pegangan hidup kita semua.

Sdr. Gubernur, Pimpinan Dewan dan hadirin yang kami hormati

Sebelum menyampaikan Pandangan Umum dari Fraksi Partai Demokrat, perkenankanlah kami mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan sidang, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum ini. Disamping itu, terimakasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Komisi-Komisi, Badan Anggaran DPRD Prov. SUMBAR dan TAPD, serta SKPD yang telah bekerja keras menyusun, membahas dan merumuskan KUA dan PPAS secara cermat, dimana KUA dan PPAS dimaksud telah dijemlakan ke dalam RAPBD Tahun 2010, yang pada tanggal 8 Desember 2009 telah disampaikan secara resmi oleh Gubernur Sumatera Barat.

Setelah memperhatikan Nota Keuangan dari RAPBD tahun 2010 tersebut, menurut kami penyusunan RAPBD dimaksud telah memperhatikan sistem dan prosedur tentang perencanaan dan sistem anggaran kinerja dengan mempedomani sasaran tahun terakhir dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006-2010. Di dalam Nota Keuangan tersebut telah dijelaskan dengan rinci tentang

kondisi dan kebijakan anggaran pendapatan, anggaran belanja, anggaran pembiayaan dan program kegiatan. Di samping itu juga telah digambarkan capaian target kinerja yang telah dicapai melalui 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMD.

Sdr. Gubernur dan Hadirin Yang Terhormat

Sehubungan dengan telah disampaikan Nota Pengantar dan Nota Keuangan RAPBD Tahun 2010 pada tanggal 8 Desember 2009, maka ada beberapa hal yang menurut hemat kami perlu diperhatikan, perlu dipertegas dan perlu kami konfirmasi kembali kepada Sdr. Gubernur.

Adapun hal-hal dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Dalam Nota Keuangan, direview kembali capaian target kinerja terhadap 7 (tujuh) agenda pembangunan selama tiga tahun terakhir dan tahun 2010 adalah tahun terakhir dari capaian target dimaksud. Di dalam penjabarannya telah digambarkan apa-apa yang telah dicapai dalam tiga tahun tahun yang telah berlalu, hanya saja penjelasan tersebut jadi ***tidak terukur keberhasilannya, karena tidak tergambarnya target yang seharusnya dicapai dalam masa RPJMD Tahun 2006-2010***, karena itu kami mohon dijelaskan target kinerja dan pencapaian target kinerja, sehingga dengan demikian akan sangat terukur tingkat keberhasilan dari pemda dalam pencapaian target dimaksud.
2. Gempa pada tanggal 30 September 2009, telah mengakibatkan kerugian materi yang sangat besar di Sumatera

Barat, yang mencapai jumlah Rp. 21,58 triliun. Dan untuk memberikan dukungan pemulihan pasca gempa dalam RAPBD telah dianggarkan dana sebesar Rp. 207.097.299.000. Walaupun dana ini cukup besar dari persentase anggaran RAPBD, namun dari sisi jumlah kerugian kelihatannya jumlah ini belum signifikan untuk pemulihan. Untuk itu sebagai pengambil kebijakan, perlu memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk *planing* terhadap pemulihan pasca gempa yang dapat memberikan makna terhadap kontribusi APBD di dalamnya.

3. Dalam beberapa kunjungan ke Kabupaten/Kota dalam rangka persiapan menghadapi Pemilu Kepala Daerah Serentak yang direncanakan 16 Juli 2009, dari alokasi anggaran yang disiapkan PEMDA kabupaten/Kota sangat mengharapkan sharing biaya dari provinsi. Dalam RAPBD telah disiapkandana hibah untuk KPUD ini sebesar Rp.30 Milyar. Untuk itu perlu gambaran yang jelas terhadap penyelesaian masalah ini, sehingga tidak menimbulkan masalah nantinya.
4. Masalah pendidikan sebagaimana kesepakatan di dalam KUA PPAS telah diproyeksikan dalam anggaran sebesar 15,78%, sebenarnya Fraksi Partai Demokrat sangat setuju apabila angka ini dinaikkan menjadi 20 % seiring dengan APBN, sehingga dapat membiayai seluruh sarana dan prasarana pendidikan. Harapan ini kami sampaikan karena masih banyak ditemui sarana dan prasarana pendidikan kurang diperhatikan

secara serius, diantaranya, masih banyak sekolah-sekolah yang tidak layak dijadikan sarana pendidikan terutama pendidikan dasar. Secara kasat mata mudah kita lihat banyak sekolah dasar baik di kota maupun di pedesaan yang tidak layak lagi sebagai tempat anak-anak didik kita belajar dan tidak kalah pentingnya banyaknya sekolah yang hancur akibat gempa 30 September 2009 yang lalu, perlu sesegera mungkin diperbaiki atau direnovasi, sehingga anak-anak didik kita yang merupakan calon-calon pemimpin masa depan dapat belajar dengan tenang.

Di samping itu perlu menjadi perhatian kita bersama sebagaimana yang kita lihat di media masa khususnya televisi bahaya narkoba terhadap generasi muda kita, kiranya hal tersebut dapat diantisipasi jangan sampai terjadi di Sumatera Barat ini, para orang tua dan guru dan pihak-pihak berkompeten dihimbau dapat melakukan pengawasan terhadap keluarga, anak didik dan masyarakat, agar jangan sampai terjadi perbuatan yang mengarah pada penggunaan obat-obat terlarang, agar masyarakat Sumatera barat yang dikenal dengan ABS SBK tidak ternodai.

5. Dari berbagai masalah yang disampaikan dalam pengantar Nota Keuangan, Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah agar mendorong sektor riil, sehingga roda perekonomian dapat berjalan lebih dinamis untuk dapat memacu pertumbuhan

investasi dan penyerapan tenaga kerja dalam rangka mengurangi angka pengangguran.

Selanjutnya dalam masa recoveri dan rekonstruksi pasca gempa ini Pemerintah seharusnya bisa memanfaatkan lembaga keuangan yang dimiliki seperti BPD serta Bank Perkreditan Rakyat yang sahamnya berasal dari APBD, banyak sektor usaha yang bisa dibiayai dengan bantuan kredit dari dunia perbankan, dalam hasil kunjungan kami ke berbagai daerah beberapa sektor masih kurang mendapatkan perhatian dari dunia perbankan karena sifat pembiayaan yang perlu membuat kajian-kajian yang mendalam. Perbankan lebih tertarik untuk membiayai sektor tertentu saja, padahal pasca gempa ini seluruh sektor perekonomian harus digerakkan untuk mempercepat pulihnya perekonomian masyarakat Sumatera Barat.

Tidak kalah pentingnya perlunya peningkatan perhatian Pemerintah untuk usaha kecil dan menengah serta koperasi, baik dari permodalan, peningkatan skill dan pemasarannya.

6. Tidak terlihat stimulus peningkatan produksi pertanian dalam arti luas di kabupaten/kota yang tidak kena bencana untuk menjamin swasembada dan menjaga market share supply untuk provinsi tetangga berupa beras, sayur, ayam, daging dan ikan.

Di samping itu perlunya perhatian serius dari Pemerintah untuk revitalisasi perkebunan, pengembangan ikan tuna dan industri pengolahan coklat.

Di lain pihak Pemerintah pada tahun anggaran 2010 ini agar dapat melaksanakan pekerjaan baik fisik maupun non fisik sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Jangan terulang kembali pekerjaan-pekerjaan dalam volume di bawah 50 % dikerjakan pada akhir tahun yang dikuatirkan hasil pekerjaannya tidak maksimal.

7. Persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat hari ini adalah persoalan kesehatan, apalagi akibat gempa yang lalu masih terlihat sebagian besar masyarakat sulit untuk mendapatkan obat sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, Fraksi Partai Demokrat meminta perhatian serius dari Pemerintah agar masalah kesehatan juga menjadi prioritas disamping persoalan-persoalan lain.

Di samping itu, banyak masyarakat mengeluhkan layanan rumah sakit pemerintah yang mengecewakan pasien. Fraksi Partai Demokrat mengharapkan perlunya ditingkatkan pelayanan-pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Sarana dan prasarana kesehatan yang kurang, jangan dijadikan alasan untuk tidak memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, itu adalah lagu lama.

8. Perlunya sikap tegas PEMDA sebagai owner BUMD baik dalam memangkas birokrasi, peningkatan/peremajaan SDM dan perhatian Pemerintah dari permodalan, sehingga diketahui BUMD yang akan dibesarkan dan dibubarkan.

Di samping itu perlu perhatian Pemerintah untuk memantau pengurusan perizinan yang selama ini menjadi keluhan dari pengusaha, investor dan masyarakat serta pelaku-pelaku ekonomi

Selanjutnya Fraksi Partai Demokrat, sangat mengharapkan agar tambahan modal terhadap Bank Nagari tetap Rp. 15 Milyar dan untuk ASKRIDA Rp. 5 Milyar sesuai dengan usulan pada KUA dan PPAS yang lalu, mengingat kontribusi pendapatan dari pembagian deviden cukup signifikan sebagai sumber pendapatan daerah, apalagi nilai tersebut telah dianggarkan dalam APBD 2009 yang tidak terealisasi.

Dari hal-hal yang dijabarkan di atas, Fraksi Partai Demokrat sangat mengharapkan perlunya komitmen dan kepastian dalam mengelola keuangan daerah terutama hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan perlu dipelihara, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari program-program kerja yang dilaksanakan.

Sdr. Gubernur, Pimpinan Dewan dan Hadirin Sekalian

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan sebagai pandangan umum dari Fraksi Partai Demokrat terhadap Nota Keuangan RAPBD Tahun 2010. Sebagai representasi dari masyarakat Sumatera Barat, Kami sangat berharap sekali Sdr. Gubernur memberikan solusi alternatif terhadap beberapa hal yang dimaksud di atas.

Warna biru warna demokrat

Hijau balau sabutan kini

Bagambar bintang di sagi ampek

Di sinan fraksi manaungkan diri

Dari tadi kami lah curhat

Mambao aspirasi anak nagari

Kok tanyo mohon dijawab

Jo salam maaf kami undur diri

Akhirul Kalam Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamualaikum Wr. Wb

Padang, 10 Desember 2009

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPRD PROV. SUMBAR

KETUA



LISWANDI, SE.

SEKRETARIS



HASRANITA, SH.MH.

Penasehat	: Ir. Yulteknil, M.M
Ketua	: Liswandi, SE.
Wakil Ketua	: H. M. Nurnas, ST..
Sekretaris	: Hasranita, SH.MH.
Anggota	: H. Buzarman
	H. Suwirpen Suib
	Ermawati Tanjung
	Eldi Sutrisno Dt. Intan Batuah
	H. Novrial Anas
	Ir. H. Arkadius Dt. Intan Bano
	Novrizon
	Hj. Zahara Hasni
	H. Dodi Delvi, SE.
	Drs. H. Syamsul Bhari Yahya Dt. Lbk. Bndr



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
NOTA PENGANTAR KEUANGAN
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROV
SUMBAR TAHUN 2010**



*Disampaikan: Ir. Israr Jalinus
Padang; Kamis, 10 Desember 2009*

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

- Yth.Saudara Gubernur Propinsi Sumatera Barat.
- Yth.Saudara Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD
Propinsi Sumatera Barat
- Yth.Muspida, Ketua Pengadilan Tinggi, dan Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Sumatera Barat.
- Yth.Para Kepala Dinas, Badan, Biro dan Kantor, Rektor
Perguruan Tinggi yang hadir pada kesempatan ini.
- Yth.Pimpinan Partai Politik, Wartawan serta hadirin yang Berbahagia

Pertama dan terutama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt, karena berkat limpahan rahmat, inayah dan hidayah-Nya jua kita bersama-sama hadir dalam Sidang Paripurna yang berbahagia ini, dalam keadaan sehat wal'afiat, dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi PAN Terhadap *Nota Pengantar Keuangan Rancangan Peraturan*

Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2010.

Salawat beriringan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan arah dan tuntunan kepada umat manusia untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui Al – Qur'an dan sunnah-Nya.

Kami Fraksi PAN selanjutnya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi PAN terhadap **Nota Pengantar Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2010.**

Pada kesempatan ini kami Fraksi PAN DPRD Prov.Sumbar mengucapkan selamat kepada saudara Prof.Dr. Marlis Rahman. M.Si yang telah dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Gubernur Sumbar sisa masa jabatan 2005 -2010 pada hari Senin Tanggal 07 Desember 2009, dan ucapkan terima kasih kepada Saudar Gamawan Fauzi, SH,MM yang telah mendarma baktikan dirinya lebih kurang dari 4 tahun sebagai Gubernur Sumbar semoga ditempat yang baru sebagai Menteri Dalam Negeri dapat berbuat lebih baik lagi untuk bangsa dan Negara yang kita cintai ini.

Penyampaian Nota Keuangan tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2010 merupakan APBD yang terakhir bagi Kepala Daerah periode 2005-2010. dan merupakan APBD yang pertama bagi Anggota DPRD Prov.Sumbar periode 2009-2014.

Melihat dari kenyataan dan isu aktual yang ada saat ini APBD tahun 2010 merupakan APBD yang amat berat karena begitu banyak hal - hal yang harus kita hadapi seperti pemulihan pasca bencana Gempa 30 September 2009 yaitu

Recovery, Rekontruksi dan Rehabilitasi serta Pilkada yang serentak dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat dan hal-hal penting lainnya, oleh karena itu perlu kebersamaan kita dalam menjalankan pola kemitraan yang sesungguhnya menurut etika pemerintahan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Melihat dari penyampaian Nota Keuangan dan RAPBD yang disampaikan oleh Gubernur pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2009, secara umum belum maksimal capaian-capaian kinerja yang kita capai dari tahun 2006-2009 sesuai dengan target RPJM 2006-2010.

Sementara target RPJM tinggal 10 bulan lagi, perlu terobosan dan kerja keras kita bersama dalam mewujudkan capaian sesuai yang kita harapkan dan harapan seluruh masyarakat Sumatera Barat.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota serta Undangan yang kami muliakan!

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2010 kita dihadapkan pada kondisi yang sangat memperhatikan dengan terjadi Gempa bumi yang berkekuatan 7,9 SR yang telah memporak porandakan sebagian wilayah Sumatera Barat antara lain, Fasilitas Umum, Infrastruktur, Perumahan Masyarakat, Gedung Pemerintah , Sarana Dan Prasarana Perekonomian , disamping itu juga menimbulkan trauma bagi masyarakat kita. Dampak dari kondisi tersebut diatas menyebabkan lumpuhnya sendi-sendi perekonomian masyarakat kita.

Selanjutnya setelah hampir 5 tahun jalannya pemerintahan periode 2005-2010 dalam mengimplementasikan RPJM Sumbar tahun 2006-2010 yang ditetapkan melalui Perda No.04 tahun 2007. Kita perlu mereview kembali

tentang program-program dan kegiatan yang telah kita lakukan selama 4 tahun belakang ini, hal ini sangat perlu sebagai pijakan bagi kita untuk mengevaluasi sejauh mana pencapaian target program serta efektivitasnya dalam menjawab berbagai persoalan dan kendala yang kita hadapi dan tidak kalah pentingnya bagi kita adalah melakukan kajian dan evaluasi terhadap hal-hal yang prioritas yang harus kita tuntaskan pada tahun 2010.

Berbagai perkembangan dan peningkatan kegiatan yang progresif yang telah kita capai dalam beberapa tahun terakhir, beberapa program telah menampakkan hasil yang maksimal dan hal itu tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras kita bersama yang secara sungguh-sungguh memberikan yang terbaik bagi daerah yang kita cintai ini.

Pada kesempatan ini kita perlu memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh stekholder dan komponen masyarakat Sumbar yang telah memmberikan dukungan positif pada setiap program kegiatan yang telah kita lakukan, dan yang tidak kalah pentingnya terjaganya bina mika masyarakat yang kondusif dan konstruktif, tinggi nya tingkat kesadaran sosial dan tanggungjawab bersama. Hal ini perlu kita jaga dan kita pupuk, sehingga kita bisa lebih maksimal dalam penyelenggaraan pemerintah kedepan.

Rancangan Perda tentang APBD tahun 2010 yang telah saudara Gubernur sampaikan merupakan hasil rumusan dan bahasan kita bersama antara legislative dan Pemeintaha daerah yang telah dituangkan dalam Dokumen perencanaan yang telah kita tetapkan. Kebijakan pembangunan tahun 2010 kita tuangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur No. 23 Tahun 2009, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah kita sepakati pada tanggal 3 Desember 2009 yang lalu, yang merupakan dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD tahun 2010.

Sebelum kita memulai pembahasan RAPBD tahun 2010 pada kesempatan ini kami Fraksi PAN menyampaikan Saran, Tanggapan sebagai berikut :

1. Perlu Optimalisasi dan Maksimalisasi dalam menjalankan fungsi utama pemerintahan daerah yaitu Fungsi pengatauran, fungsi pelayanan, dan fungsi pemberdayaan yang terintegrasikan dengan kinerja masing-masing SKPD
2. Asumsi-asumsi yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan Umum APBD tahun 2010 selanjutnya dapat lebih efektif dan efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber penerimaan daerah dan lebih prioritas untuk pemulihan akibat bencana gempa tetapi tetap melaksanakan program-program yang terkait pemberdayaan masyarakat ,pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur dasar guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga sinkronisasi dan sinergitas program dari masing-masing SKPD akan terlihat dalam efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan Anggaran.
3. Perlu sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota dengan tetap memperhatikan pembagian urusan dan kewenangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007, sehingga pembangunan nasional dan pembangunan daerah dapat berjalan secara maksimal, komprehensif dan terpadu dalam menghadapi tantangan Global.
4. Dalam menghadapi masalah yang mendasar dihadapi oleh daerah sesuai dengan amanat Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional kita baru mampu mengalokasikan sebesar 15,78% dan kita harapkan di tahun 2011 nanti amanat Undang-undang tersebut dapat kita wujudkan yaitu 20% dari total APBD, dan kita prioritaskan untuk mutu , relevansi dan daya saing pendidikan kita dimasa yang akan datang.

5. Dalam tahapan rehabilitasi dan rekontruksi baik fisik maupun non fisik perlu ada rencana induk, rencana aksi dan desain aplikasi terukur dan terintegrasi dari masing-masing kegiatan yang kita lakukan agar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
6. Dalam menghadapi Pilkada langsung pada bulan Juni 2010 perlu komunikasi yang intensif antara Pemerintah Daerah, KPU Sumbar serta Pemereintah Kab/Kota supaya dalam perjalanan dan pelaksanaanya tidak menuai persoalan-persoalan yang serius, yang nantinya dapat menimbulkan krisis politik dan krisis sosial dimasyarakat.
7. Dalam memacu laju pertumbuhan ekonomi perlu ada terobosan dan inofasi baru dalam meningkatkan infestasi yang masuk ke daerah dengan mengoptimalkan standar pelayanan publik yang ramah infestasi,.
8. Perlu upaya-upaya yang konkrit dalam menyelesaikan proyek-proyek yang startegis serta optimalisasi penggaetan dana pusat dengan memanfaatkan instrument-instrumen politik yang ada dipusat seperti Anggota DPR, DPD dan para Menteri yang berasal dari Sumbar.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota serta Undangan yang kami muliakan!

Untuk menjawab tantangan yang kami di sampaikan diatas sesuai dengan Rancangan Peraturan Daerah APBD tahun 2010 yang di sampaikan Saudara Gubernur Sebesar Rp. 1.859.089.120.250 dengan rincian Pendapata Daerah Sebesar Rp. 1.622.670.120.250, dan Anggaran Penerimaan Pembayaran sebesar Rp. 236.410.000.000, Belanja Daerah sebesar Rp. 1.817.068.120.250,- dan Alokasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 42.021.000.000,-

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota serta Undangan yang kami muliakan!

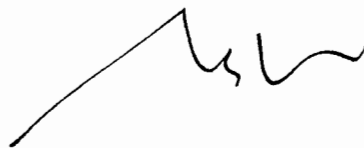
Demikian Pemandangan Umum Fraksi Amanat Nasional DPRD Sumbar ini kami sampaikan semoga dapat jadi masukan bagi kita dalam tahapan pembahasan berikutnya dan dalam menajlankan roda pemerintahan kedepan.

Billaahi Fii Sabiilil haq
Pastabiqul Khairat
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Padang , 10 Desember 2009

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

KETUA FRAKSI



Ir. ISRAR JALINUS



SEKRETARIS FRAKSI



ARTATI, SH

H. M. Asli Cahidir	(Penasehat)
Muzli M. Nur, S.Pd	(Wakil Ketua)
Indra Dt. Rajo Lelo, SH	(Bendahara)
Lela Pujianti	(Anggota)